

BUKU SEBAGAI BAHAN AJAR  
(HANJAR)

KEBIJAKAN SISTEM PEMIDANAAN  
YANG BERORIENTASI PADA KORBAN  
(DILENGKAPI DENGAN BAHAN  
KAJIAN PERBANDINGAN)

Oleh :

Dr.Eko Sopyono, SH MH

Fakultas Hukum  
Universitas Diponegoro  
Semarang  
2011

# Kata Pengantar

Pembaharuan Hukum Pidana pada hakikatnya adalah pembaharuan Sistem Pidana dalam makna Fungsional dan Substantif. Dalam makna fungsional, pembaharuan sistem pidana meliputi pembaharuan Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formil dan Hukum Pelaksanaan Pidana, sedang dalam makna substantif, pembaharuan sistem pidana meliputi pembaharuan Aturan Umum (*General Rules*) dan Aturan Khusus (*Special Rules*).

Dalam ketentuan perundang-undangan, baik dalam KUHP dan di luar KUHP kebijakan perumusan sistem pidana lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana daripada berorientasi pada korban.

Buku yang disusun sebagai Bahan Ajar ini menyajikan kebijakan sistem pidana yang berorientasi pada korban dan dilengkapi dengan bahan kajian perbandingan. Kebijakan sistem pidana dalam buku ini dalam maknanya fungsional dan substantif.

Disusunnya buku ini diharapkan dapat memberikan sedikit pemahaman bagi para mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat di bidang Hukum Pidana dan juga para pembaca pemerhati bidang Hukum Pidana.

Akhirnya penyusun sampaikan rasa terimakasih atas perhatiannya dan atas segala kekurangan, mohon kritik dan saran demi sempurnanya buku ini.

Semarang, Desember 2011

# DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>COVER</b> .....	i
<b>PRAKATA</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I KEBIJAKAN SOSIAL, KEBIJAKAN KRIMINAL DAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA</b> .....	1
1. Pengertian “kebijakan” dan pengertian “sistem” .....	5
2. Pengertian dan ruang lingkup kebijakan sistem pemidanaan.....	9
<b>BAB II HAKIKAT PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA</b> .....	19
a. Pengertian dan Ruang Lingkup Korban.....	23
1. Pengertian tentang korban .....	23
2. Ruang lingkup (tipologi) korban.....	33
b. Berbagai Konsep Tentang Korban.....	43
1. Dari para sarjana .....	43
2. Dari hukum yang hidup dalam masyarakat .....	60
<b>BAB III KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN DALAM HUKUM POSITIF SAAT INI</b> .....	86
1. Kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana materiil .....	118
a. Perumusan tindak pidana (kriminalisasi) dan perumusan pertanggung-jawaban pidana .....	118
b. Perumusan pidana/pemidanaan.....	129

2. Kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pidana formil.....	143
3. Kebijakan perumusan perlindungan korban dalam hukum pelaksanaan pidana .....	172

**BAB IV KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN DALAM HUKUM POSITIF YANG AKAN DATANG .....**

179

1. Ruang lingkup kebijakan perumusan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Materiil .....	223
1.a. Ruang lingkup “aturan umum” (general rules).....	223
1.b. Ruang lingkup “aturan khusus” (special rules).....	263
2. Ruang lingkup kebijakan perumusan perlindungan korban dalam Hukum Pidana Formil.....	265
2.a. Perumusan tentang kedudukan/posisi korban dalam proses peradilan .....	265
2.b. Perumusan bentuk-bentuk sanksi.....	267
2.c. Perumusan tentang hak-hak korban .....	268
2.d. Perumusan tentang penyelesaian di luar pengadilan antara pelaku tindak pidana dan korban (a.l. masalah mediasi) dan kebijakan perumusan tentang akibat/konsekuensi hukum dari penyelesaian di luar pengadilan.....	270
3. Ruang lingkup kebijakan perumusan perlindungan korban dalam Hukum Pelaksanaan Pidana .....	270
3.1. Perumusan aturan pelaksanaan sanksi/tindakan (ganti rugi/kompensasi/rehabilitasi).....	271
3.2. Sistem pengawasan .....	273

**BAB V KEBIJAKAN PERUMUSAN SISTEM PEMIDANAAN YANG BERORIENTASI PADA KORBAN DALAM HUKUM POSITIF KAJIAN PERBANDINGAN.....**

276

1) Dalam hukum pidana materiil Albania .....	287
2) Dalam hukum pidana materiil Bahamas .....	290
3) Dalam hukum pidana materiil Iran .....	299
4) Dalam hukum pidana materiil Philippina.....	313
5) Dalam hukum pidana materiil Djibouti.....	318
6) Dalam hukum pidana materiil Nigeria.....	320
<b>BAB VI RANGKUMAN.....</b>	<b>356</b>

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Positif Saat Ini .....	86
Tabel II : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Positif Saat Ini .....	90
Tabel III : Kebijakan Perumusan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Positif Yang Akan Datang.....	200
Tabel IV : Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban Dalam Hukum Positif Kajian Perbandingan .....	277
Tabel V : Standar Internasional Bagi Kepentingan Korban.....	330

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Bagan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Arti Luas.....	11
Gambar 2.2 Bagan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Arti Sempit .....	12